

**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
DI KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN
SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

Oleh :

Mohamad Lestari

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis minor dan mayor yang diajukan diterima. Kata kuncinya implementasi program, komunikasi, kemampuan kerja dan sikap kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 89 – 90), bahwa:

Kelahiran negara–negara baru melalui proses dekolonialisasi setelah perang dunia II, menimbulkan tantangan baru bagi negara–negara tersebut, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita–citakan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita–citakan tidak saja di serahkan begitu saja pada proses evolusioner, spontan dan alami sebagaimana proses sejarah yang telah dilalui oleh negara–negara maju. Tuntutan historis ini mendorong negara–negara baru itu untuk dituntut untuk melakukan proses perubahan sosial yang terencana, *a planned societal change*, untuk mewujudkan model masyarakat tersebut. Proses perubahan sosial yang terencana tersebut disebut pembangunan.

Indonesia sebagai berkembang dalam usaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melakukan apa yang dinamakan pembangunan dengan menggunakan paradigma pembangunan sebagai dasar pijakan untuk

mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Pada awal orde baru bangsa Indonesia dalam pembangunan menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi, dimana menurut **Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 94)**, bahwa:

Manivestasi dari orientasi pada pertumbuhan ekonomi ini nampak didalam berbagai kebijakan pembangunan yang diambil, yang pada hakikatnya bertujuan memperbesar *saving ratio* (reformasi perpajakan, reformasi perdagangan, peningkatan ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur, devaluasi bantuan luar negeri dan sebagainya), serta memperkecil laju pertumbuhan penduduk.

Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi tersebut walaupun telah mencapai taraf pertumbuhan ekonomi 7 % namun demikian prestasi yang telah terjadi tersebut hilang hanya dengan hitungan bulan sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang menjalar kearah krisis yang multidimensional dan hingga sekarang kita semua berusaha untuk kembali membangun bangsa yang terpuruk dalam kemelaratan, dimana dampak yang paling mencolok adalah kolapnya perekonomian rakyat kecil.

Untuk itulah berdasar apa yang telah terjadi sebuah pelajaran yang dapat dipetik bahwa paradigma pembangunan pertumbuhan ekonomi dianggap gagal dalam pembangunan nasional. Maka pemikiran yang kemudian muncul adalah adanya paradigma pembagunan pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah pemberdayaan dalam mendorong perekonomian rakyat.

Beberapa program pemerintah yang diarahkan untuk mendorong perekonomian masyarakat telah banyak dilakukan melalui pengembangan keswadayaan masyarakat dalam bentuk perkreditan. Program perkreditan, seperti tersebut meliputi: Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memfokuskan diri pada program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan

Semarang Utara, Kota Semarang. PEMP merupakan program unggulan dengan sumber dana melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS). Dana-dana yang diperoleh dari hasil pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dialihkan salah satunya untuk mensubsidi penduduk miskin. Hasil pengurangan tersebut mencapai 4,4 trilyun rupiah dikembalikan kepada masyarakat melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) yang berupa penyediaan beras murah sebesar 500 milyar rupiah, penyediaan air bersih 250 milyar rupiah, pelayanan kesehatan 950 milyar dan bantuan pendidikan 135 milyar serta bantuan penduduk miskin 1.395 milyar rupiah.

Tujuan dari PEMP adalah pengembangan usaha yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut dengan melalui perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program-program lain.

Untuk memperjelas PEMP, berikut ini data tentang PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel I. 1, berikut:

Tabel I. 1
PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA DANA BANTUAN
PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Penerima Program	KMP	Anggota	Dana Ekonomi Produktif
1	Pengolah ikan	4	31	Rp. 36.425.000,00
2	Penangkapan/ Nelayan	57	498	Rp. 240.900.000,00
3.	Pedagang campuran	7	53	Rp. 36.425.000,00
	Jumlah	68	551	Rp. 323.900.000,00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

Besarnya pinjaman tiap anggota berdasarkan kategori penerima program berbeda-beda, berikut ini peneliti gambarkan mengenai besarnya pinjaman per anggota berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat pada tabel I. 2 berikut:

Tabel I. 2
BESARNYA PINJAMAN DAN JENIS USAHA
SERTA BESARNYA ANGSURAN PER BULAN
PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Jenis Usaha	Besarnya Pinjaman	Jasa Dan Jangka Waktu Pinjam	Besarnya Iuran/ Bulan
1	Nelayan	Rp. 500.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 49.200,00
2	Pengolah ikan	Rp. 1. 175.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 99.182,00
3	Pemanggang ikan	Rp. 1. 175.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 115.542,00
4	Pedagang Ikan Segar	Rp. 850.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 83.583,00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

Pengelolaan program PEMP dalam pelaksanaannya dilakukan dengan manajemen program dengan model pengelolaan dana Kelompok Masyarakat (KMP) dengan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEP-M3) sebagai pengelola dana di tingkat kota yang dilakukan secara musyawarah yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Program PEMP berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan koordinator KMP dan LPPE-M3 bahwa program tersebut dalam implementasinya kurang berhasil secara maksimal. Kurang berhasilnya implementasi program tersebut dapat dilihat dari adanya fenomena sebagian penerima program yang menunggak angsurannya yang disebabkan oleh adanya persepsi dari masyarakat bahwa program tersebut bentuknya hibah sehingga jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan mereka menganggap bukan suatu masalah. Berikut ini data tunggakan program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas sampai dengan Bulan April Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel I. 3 berikut:

Tabel I. 3
TUNGGAKAN PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS
SAMPAI DENGAN APRIL 2004

No	Penerima Program	KMP	Anggota	Dana Ekonomi Produktif
1	Pengolah ikan	4	12	Rp. 8. 925. 000,00
2	Penangkapan/ Nelayan	57	231	Rp. 93. 757. 000,00
3.	Pedagang campuran	7		
	- Pedagang ikan		10	Rp. 2. 827.000,00
	- Peralatan nelayan		-	-
	- jual BBM		9	Rp. 2. 925. 000, 00
	Jumlah	68	262	Rp. 108. 434. 0000, 00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2004

Beberapa dugaan yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi kurang berhasilnya implementasi program PEMP ditunjukkan oleh sebagian fenomena adanya sebagian penerima program yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan rumah tangga yang sifatnya konsumtif baik digunakan untuk membeli televisi, radio maupun untuk memperbaiki rumahnya. Penyebab dari kurang berhasilnya implementasi program tersebut diduga disebabkan oleh *pertama*, kurang intensifnya sosialisasi program kepada calon penerima program yang tidak secara menyeluruh diberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program. Kurang intensifnya komunikasi program tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi program kepada warga penerima program PEMP yang hanya berlangsung 4 kali ketika pengenalan program dan itupun yang diundang hanya perwakilan warga saja yaitu pihak RT/ RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai akibat dari kondisi ini maksud dan tujuan program tidak secara merata diterima oleh penerima program karena pihak-pihak yang datang dalam pertemuan ada yang menyampaikan hasil-hasil pertemuan dan tidak menyampaikan hasil-hasil pertemuan sosialisasi Program PEMP.

Kedua, faktor yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi program PEMP disebabkan oleh kurang memadainya kemampuan pelaksana program. Kondisi kurang memadainya kemampuan para pelaksana program bisa dilihat dari sebagian sebagian besar para pelaksana program PEMP yang umumnya berpendidikan rata-rata hanya lulusan SMP, yang sebagian besar berasal dari para nelayan yang mempunyai tugas sebagai penarik angsuran dan koordinator kelompok seperti yang dijumpai di lapangan dalam menjalankan tugasnya mereka lebih banyak bertugas pada tataran menarik angsuran tanpa melakukan proses pemahaman kebijakan dan pemberian petunjuk pelaksanaan program. Sedangkan tugas pemahaman terhadap tujuan PEMP dan mekanisme pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pengurus program. Gambaran mengenai kemampuan pelaksana program dapat dilihat dari tabel I. 4 berikut:

Tabel I.4
TINGKAT PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM PEMP
DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Rincian	Persentase
1	SD	23 (koordinataor)	32,850
2	SMP/ sederajat	38(koordinator)	54,285
3	SMA/ sederajat	7 (4 koordinator, 2 pengurus)	10,000
4	Perguruan tinggi	3 (pengurus)	2,850
Jumlah		71	100,000

Sumber: PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

Ketiga, faktor penyebab yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi program PEMP adalah kurang mendukungnya sikap pelaksana program, dimana mereka menganggap program memberatkan dirinya karena dia diberi beban kerja tanpa imbalan yang seimbang mengingat kerjanya bersifat sukarela. Implikasi yang terjadi dari adanya faktor tersebut adalah menimbulkan kurangseriusan pelaksana dalam bekerja seperti munculnya sikap malas dalam menarik angsuran pada kelompoknya. Oleh karena itu, mengingat permasalahan-permasalahan di atas tersebut, maka implementasi program tersebut merupakan fenomena yang penting untuk diteliti.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

B. 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Program PEMP di kelurahan Tanjung Mas dalam implementasinya kurang berhasil.
2. Proses komunikasi program kurang intensif dilaksanakan.
3. Kemampuan kerja pelaksana kebijakan kurang memadai.
4. Sikap pelaksana kebijakan kurang mendukung.

B. 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah kurang berhasilnya implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan

Semarang Utara, Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program?”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berbagai literatur baik dari ilmu politik maupun ilmu administrasi negara, para pakar memberikan definisi kebijakan publik secara berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini logis karena para ahli biasanya dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang ingin ditelaah ataupun perbedaan pendekatan dan metode penelitian yang dipengaruhi.

James Anderson (Islamy, 1992 : 17), merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam kerangka demikian, maka hakekat suatu kebijakan tidak hanya bersifat ketentuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait.

Kemudian kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan publik memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintah. **Menurut Thomas R. Dye (1978 : 3)** kebijakan publik diartikan sebagai :

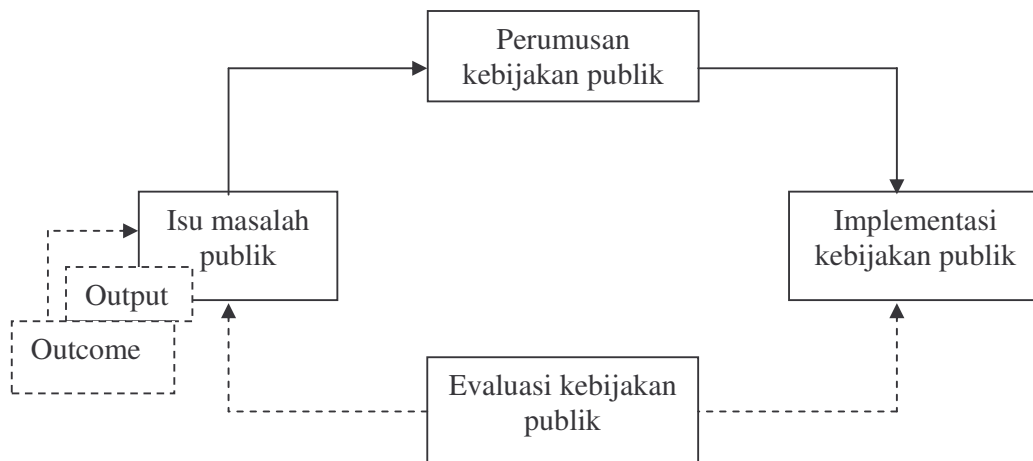
Whatever governments choose to do or not to do (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja.

Sementara itu menurut Chief J. O. Udoji (Wahab, 1997: 5), mendefinisikan kebijakan-kebijakan publik sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai sebagian besar warga masyarakat.

Mengacu pada apa yang disampaikan di atas, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi.

Dalam kebijakan publik terdapat siklus kebijakan publik, menurut Riant D. Nugroho (2003: 73–74), dalam tataran ideal–teoritis–metodologis yaitu tentang bagaimana siklus sematik dari kebijakan publik.

Gambar II. 1
SKEMA
SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK



Sumber: Riant D. Nugroho Tahun 2003

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

- 1). Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus di selesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

- 2). Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- 3). Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama masyarakat.
- 4). Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- 5). Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dimanfaatkan oleh para pemanfaat.
- 6). Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema tersebut di atas kita melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

- 1). Perumusan kebijakan
- 2). Implementasi kebijakan
- 3). Evaluasi kebijakan.

Kemudian **Budi Winarno (2002: 28–30)** mengutip bukunya **William Dunn (1998: 24–25)**, mengemukakan tahap–tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1). Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah–masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali dan beberapa lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
- 2). Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah–masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari penyelesaian masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing–masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing–masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- 3). Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau peradilan.

- 4). Tahap implementasi kebijakan
Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin ditentang oleh para pelaksana.
- 5). Tahap penilaian kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho D dan kutipan Budi Winarno mengenai tahap-tahap implementasi kebijakan publik dari William Dunn tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan publik dalam prosesnya menyangkut tiga hal mendasar yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berkaitan dengan terminologi kebijakan publik tersebut di atas, yang menjadi kajian penelitian dalam tesis ini adalah tahap yang kedua dalam proses kebijakan publik yaitu implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Berikut ini akan peneliti paparkan beberapa pendapat dari para ahli teori kebijakan sebagai landasan teori yang mendasari penelitian.

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 1997 : 79-81), mengembangkan model yang disebut sebagai “*A model of the policy implementation process*” (model proses implementasi kebijakan), kedua ahli di atas mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan

oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variabel-variabel bebas tersebut ialah :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan,
2. Sumber-sumber kebijaksanaan,
3. Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,

Penjelasan selanjutnya variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Selanjutnya menurut **George Edwards III (Imawan, 1999: 12)**, mengemukakan setidaknya ada empat variabel yang secara operasional menentukan keberhasilan / kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi maksudnya upaya mengalihkan (*transfer*) pemahaman tujuan kebijakan dari perencana ke pelaksana.
2. Sumber daya (*resources*) yang dimiliki, yang meliputi sumber daya, staff pelaksana lapangan, serta sumber materiil pendukung lainnya.
3. Disposisi / sikap yakni preferensi pelaksana untuk menentukan tahapan-tahapan yang paling mungkin dilakukan (*feasible*) yang boleh jadi sedikit menyimpang dari yang telah ditentukan. Penyesuaian dilakukan sejauh hal itu untuk mensiasati hambatan-hambatan yang ada di lapangan.
4. Struktur, orientasi sebagai penopang utama kebijakan publik.

Kemudian menurut **Rina Martini, dkk (Yuwono dan Badjuri, 2002: 120– 126)**, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan publik, yaitu :

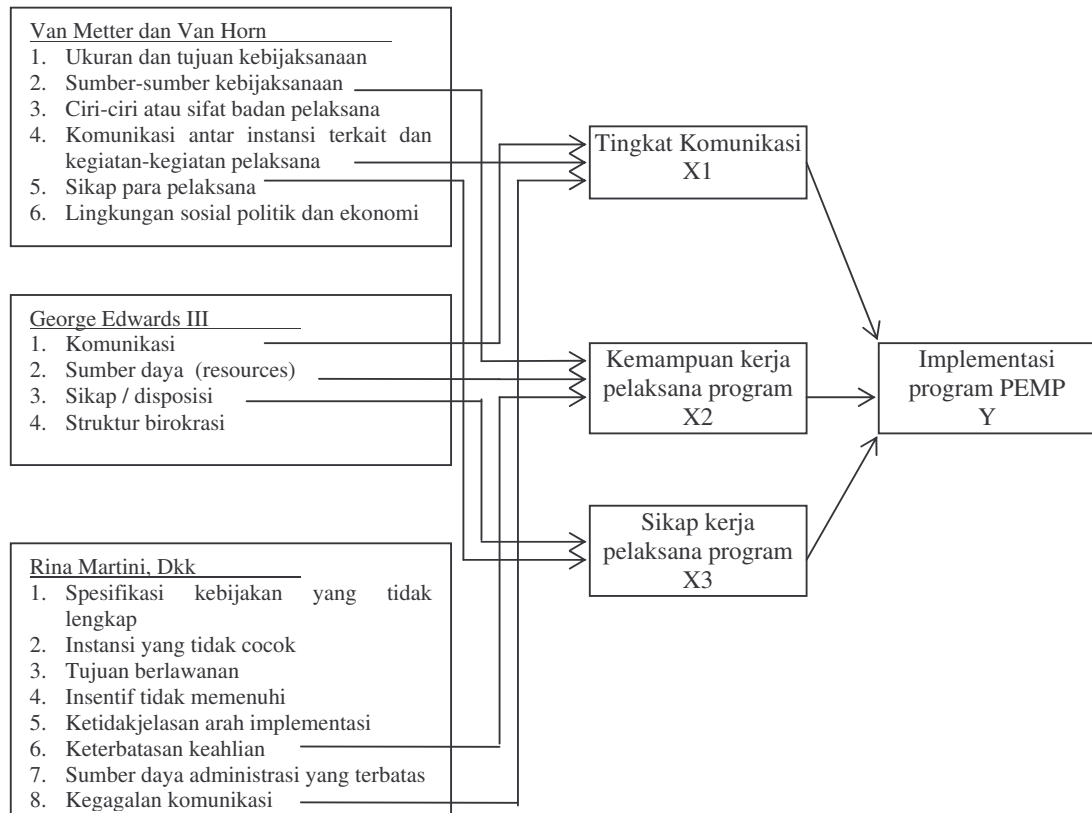
1. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap
2. Instansi yang tidak cocok
3. Tujuan yang berlawanan
4. Insentif tidak memadai
5. Kebijaksanaan arah implementasi
6. Keterbatasan keahlian
7. Sumber daya administrasi yang terbatas
8. Kegagalan komunikasi

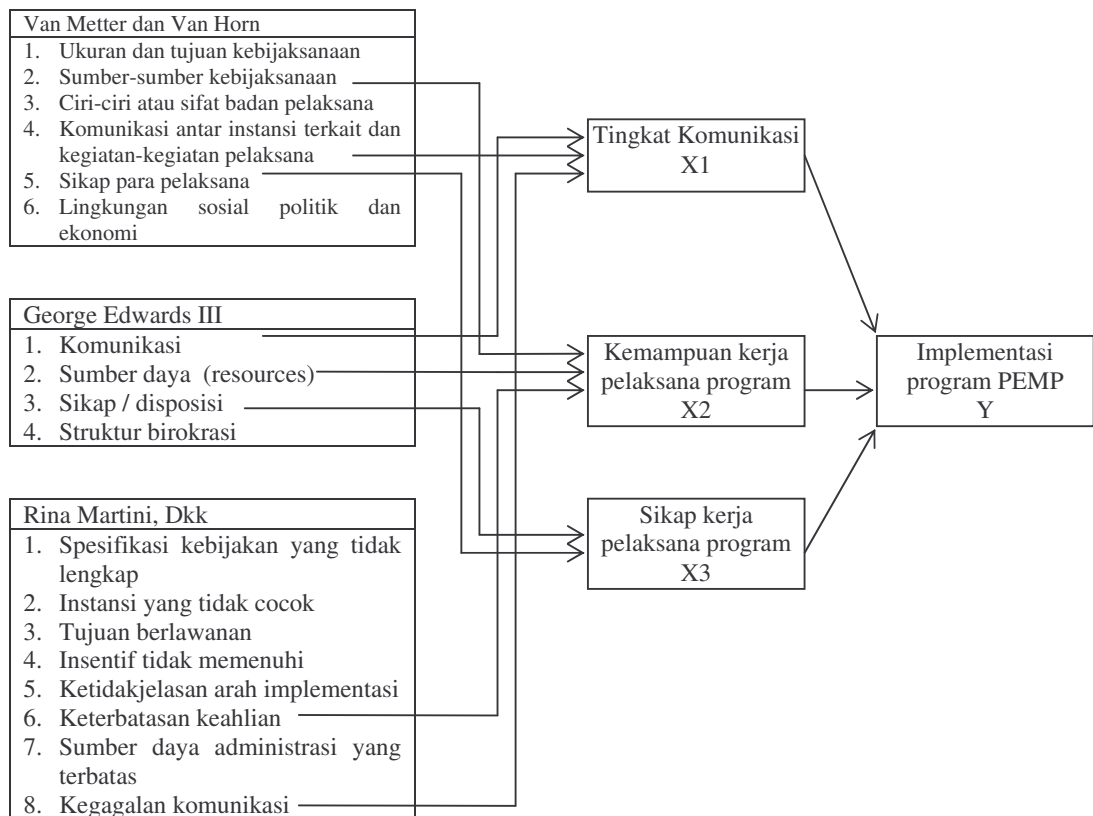
Berdasarkan paparan dari peneliti dan dengan dikaitkan rumusan masalah penelitian yang peneliti kemukakan di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tergantung (dependen variabel) atau Y yaitu implementasi program, yang dihubungkan dengan variabel X (independent variabel) yaitu, X1 tingkat komunikasi yang diturunkan dari komunikasi antar instansi, komunikasi, dan kegagalan komunikasi.

Kemudian, variabel X2 kemampuan kerja pelaksana program, peneliti turunkan dari sumber-sumber kebijaksanaan, sumber daya (*resources*), dan keterbatasan keahlian, sedangkan untuk variabel X3 sikap kerja pelaksana program peneliti turunkan dari sikap para pelaksana dan sikap atau disposisi.

Uraian di atas jika peneliti tuangkan dalam bagan, adalah sebagai berikut :

Bagan II. 2
BANGUN TEORI PENELITIAN
PENGARUH TINGKAT KOMUNIKASI (X1), KEMAMPUAN KERJA
PELAKSANA PROGRAM (X2), DAN SIKAP KERJA PELAKSANA
PROGRAM (X3) TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PEMP (Y)





B. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis Minor

- a. Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Terdapat pengaruh kemampuan kerja pelaksana program (X2) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- c. Terdapat pengaruh sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- d. Hipotesis mayor
“terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatory (penjelasan). Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

B. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkungnya yaitu berusaha sebatas mengetahui pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dengan lokasi penelitian ini bertempat Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel-variabel penelitian

Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel tergantung, yaitu implementasi program (Y)
- 2) Variabel bebas, yang meliputi :
 - a. Tingkat komunikasi (X_1)
 - b. Kemampuan kerja pelaksana program (X_2)
 - c. Sikap kerja pelaksana program (X_3)

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif karena penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner dengan sumber data primer dan sekunder.

E. Instrumen Penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran kuantitatif yang sifatnya ordinal yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

F. Populasi dan Cara Sampling dan Teknik Pengambilan Sampel

- a. Populasi atau *universe*, menurut **Ida Bagus Mantra dan Kasto (Singarimbun, 1989: 152)** adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh masyarakat penerima program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Cara Sampling, menurut **M. Subana dan Sudrajat S. (2001: 115)** adalah cara mengumpulkan data dari populasi dengan mengambil sebagian saja dari anggota populasi. Jadi dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti

nantinya hanya akan mengambil sebagian saja dari anggota populasi yang dianggap mewakili penelitian.

- c. Teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *Proportional Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara proporsional mengingat populasi penelitian terdiri dari berbagai penerima program di tingkat kelurahan.

Rumus yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya sampel, yaitu rumus dari **Lynch (Taufik, 1987)** sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2 \cdot p(1 - p)}{Nd^2 + Z^2 \cdot p(1 - p)}$$

n = sample size

N = population

Z = the value of the normal variable (1, 96) for reability of 0, 95

p = the largest possible propotion (0, 95)

d = Sampling error

(0, 025 condition 1)

(0, 05 for condition 2)

(0, 10 for condition 3)

Berdasarkan rumus tersebut, maka sampling size dalam penelitian ini sebesar 82 responden:

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data penelitian ini meliputi kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis datanya secara kuantitatif dengan tahapan editing data, dan tabulasi. Selanjutnya untuk mengetahui korelasi antar variabel menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan Koefisien Korelasi *Rank Kendall (RS)* untuk korelasi tunggal, sedangkan untuk korelasi ganda (secara bersama-sama) menggunakan metode *Konkordasi Kendall*. Alasan yang mendasari penggunaan

teknik analisa uji signifikansi dengan Korelasi *Rank Kendall* karena skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y menggunakan teknik Koefisien Determinan (KD).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Dalam bab ini akan dideskripsikan data-data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang telah diajukan kepada responden. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 82 orang dan keterangan yang dihimpun dari mereka dipergunakan dalam analisa data dan pengujian hipotesis.

Data yang akan diuji meliputi identitas responden, variabel implementasi program (Y), tingkat komunikasi (X1), kemampuan pelaksana program (X2) dan sikap pelaksana program (X3). Semua data itu akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang guna memberi gambaran secara menyeluruh tentang fenomena yang diamati dan ditemukan di lapangan. Disamping itu juga untuk memberikan gambaran dasar pengujian hipotesis penelitian.

A. 1. Identitas Responden

Identitas responden dilihat dari segi usia sebagian besar responden 43 (52, 44 %) berusia antara 31- 40 tahun. Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok usia produktif dan menuju pada usia kematangan dalam bekerja sehingga dilihat dari sisi usia responden mempunyai kecenderungan untuk dapat memanfaatkan program PEMP secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Responden dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD sebanyak 39 orang (47, 57 %). Oleh karena itu, dilihat dari tingkat pendidikan responden yang sebagian besar tidak sekolah/ tidak tamat SD maka ada kemungkinan proses terhambatnya

implementasi karena kemungkinan penerima program kurang bisa menerima pesan-pesan program secara baik dalam implementasi program PEMP.

Kemudian responden dari jenis kelamin sebagian besar responden adalah laki-laki 57 (69, 51%). Jadi dengan demikian ada kemungkinan adanya kondisi dukungan penerima program karena laki-laknya biasanya lebih rasional dari pada perempuan. Sementara itu responden menurut kategori program sebagian besar (84, 15 %) adalah nelayan. Hal ini berarti sesuai dengan rencananya bahwa program PEMP diperuntukan untuk masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

A. 2. Implementasi program (X1)

Berikut ini tabel yang menunjukkan kondisi dari variabel implementasi program.

Tabel IV. 1
REKAPITULASI PENILAIAN
VARIABEL IMPLEMENTASI PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	16	19, 51
KurangTinggi (KT)	40	48, 78
Cukup Tinggi(CT)	24	29, 26
Tinggi (T)	2	2, 43
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 4-14

Dari tabel IV. 1 tentang rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa implementasi program PEMP masih kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dari nilai skor dalam kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi sebanyak 40 (48, 78%). Kondisi ini didukung oleh nilai ukur dari masing masing indikator variabel implementasi program (Y) yaitu kurang sesuai rencana-rencana program dalam implementasinya, kurang lancarnya implementasi program PEMP di lapangan, kurang mudahnya penerima program dalam memenuhi proses persyaratan kredit, kurang dilibatkannya penerima program dalam implementasi program, kurang bermanfaatnya program bagi penerima program, kurang baiknya kemampuan badan pelaksana program dalam menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan kredit, para penerima program kurang

memenuhi ketentuan dalam mengangsur kredit, program kurang mengurangi kesulitan modal penerima program, program kurang meningkatkan pendapatan penerima program, program kurang mengurangi kesulitan ekonomi penerima program, dan program kurang bisa menimbulkan kesadaran penerima program tentang arti pentingnya program pembangunan.

A. 3. Tingkat Komunikasi (X1)

Berikut ini tabel yang menunjukkan kondisi dari variabel tingkat komunikasi.

Tabel IV. 2
REKAPITULASI PENILAIAN
VARIABEL TINGKAT KOMUNIKASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	18	21,95
KurangTinggi (KT)	37	45,12
Cukup Tinggi(CT)	21	25,61
Tinggi (T)	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 15-26

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa tingkat komunikasi yang dilakukan oleh petugas dalam menyampaikan pesan tentang program PEMP mempunyai tingkat komunikasi yang kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan dari nilai skor variabel tingkat komunikasi sebagian besar kurang tinggi 37 (45,12 %). Nilai ukur dari indikator-indikator tingkat komunikasi (X1) yang menunjukkan tingkat komunikasi masih kurang mendukung dalam implementasi program PEMP adalah pelaksana program kurang menguasai informasi tentang program PEMP, pelaksana program kurang paham terhadap implementasi program PEMP, penerima program kurang jelas menerima informasi program PEMP, bahasa yang digunakan kurang jelas dan kurang mudah dipahami oleh penerima program PEMP, informasi program PEMP kurang rinci diterima penerima program PEMP, informasi yang disampaikan kurang memadai, media komunikasi yang digunakan kurang memperjelas pesan yang diterima, informasi program PEMP kurang sesuai diterima, media

komunikasi yang digunakan kurang tepat dan frekuensi penyampaian informasi program PEMP kurang rutin.

A. 4. Kemampuan kerja pelaksana program (X2)

Berikut ini tabel yang menunjukkan dari kondisi variabel kemampuan kerja pelaksana program.

Tabel IV. 3
REKAPITULASI PENILAIAN
VARIABEL KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	6	7, 3
KurangTinggi (KT)	44	53, 66
Cukup Tinggi(CT)	27	32, 93
Tinggi (T)	5	6, 09
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27-37

Dari tabel IV. 3 tentang rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa kemampuan yang dimiliki pelaksana program dalam melaksanakan program PEMP masih kurang baik hal ini ditunjukkan dari nilai skor variabel kemampuan kerja pelaksana program yang sebagian besar 53, 66 % kurang tinggi. Nilai ukur dari indikator-indikator kemampuan kerja pelaksana program yang menunjukkan kondisi kurang baiknya kemampuan kerja pelaksana program adalah kemampuan dalam melaksanakan persyaratan kredit kurang baik, kemampuan dalam menerima informasi kurang baik, kemampuan menjalin hubungan silaturahmi kurang baik, kemampuan menjalin kerjasama kurang baik, kemampuan dalam memantu menyelesaikan konflik kurang baik, kemampuan dalam menciptakan kesadaran kurang baik, kemampuan dalam memahami keluhan kurang baik, kemampuan dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan kurang baik, kemampuan dalam merumuskan solusi

permasalahan kurang baik, kemampuan dalam mengikuti prosedur-prosedur implementasi kurang baik, dan kemampuan dalam mengarsipkan kertas kerja kurang baik.

A. 5. Sikap pelaksana program (X3)

Berikut ini tabel yang menunjukkan kondisi variabel sikap pelaksana program.

Tabel IV. 4
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL
SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	7	8, 54
KurangTinggi (KT)	38	46, 34
Cukup Tinggi(CT)	26	31, 71
Tinggi (T)	11	13, 41
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 37-47

Dari tabel IV. 4 tentang rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa sikap kerja pelaksana program yang dimiliki pelaksana program dalam melaksanakan program PEMP kurang baik bagi terciptanya tujuan program, hal ini ditunjukkan oleh rekapitulasi penilaian variabel sikap kerja pelaksana program sebagian besar 46, 34 % kurang tinggi. Kondisi ini didukung oleh nilai ukur dari masing- masing indikator variabel tersebut yaitu melaksanakan tugasnya kurang sesuai dengan keinginan pribadinya, tanggapan yang kurang positif terhadap program PEMP, kurang percaya program kaan membawa perubahan yang positif, cukup bertentangnya dengan keyakinan yang dianutnya, kurang intensifnya dalam menarik angsuran, melaksanakan tugas kurang sesuai dengan aturan program PEMP, kurang bekerjasama dalam menjalin kerjasama, kurang menerima program dengan sepenuh hatinya, kurang netral dalam menjalankan tugasnya dan cukup mempengaruhi penerima program dalam menentang program PEMP.

B. Analisis Data

Pada bab ini akan disajikan beberapa tabulasi silang yang akan menunjukkan hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Analisis dalam bentuk tabulasi silang ini dimaksudkan untuk seberapa besar persentase hubungan antara masing masing variabel X dengan variabel Y.

Setelah itu penulis juga akan mengajukan analisis secara kualitatif yang bertujuan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif. Hasil dari analisis kualitatif ini didapat dari hasil alasan dari setiap pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner.

B. 1. Analisis Kuantitatif

B. 1. 1. Hubungan antara tingkat komunikasi (X_1) dengan implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Hubungan antara tingkat komunikasi (X_1) dengan implementasi program PEMP (Y) dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 6, sebagai berikut:

Tabel IV. 6
TABULASI SILANG ANTARA TINGKAT KOMUNIKASI (X_1)
DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)

Implementasi program	Tingkat komunikasi				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	1			2
	(16,67%)	(4,76%)			(2,4%)
CT	5	13	6		24
	(83,33%)	(61,90%)	(16,22%)		(29,27%)
KT		7	22	11	40
		(33,33%)	(59,46%)	(61,11%)	(48,78%)
R			9	7	16
			(24,32%)	(38,88%)	(19,51%)
Jumlah	6	21	37	18	82

	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
--	--------	--------	--------	--------	--------

Keterangan
T = Tinggi
CT = Cukup Tinggi
KT = Kurang tinggi
R = Rendah

Dari tabel IV. 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa tingkat komunikasi tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 83, 33 % mengatakan tingkat komunikasi tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi cukup tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 61, 90 % mengatakan tingkat komunikasi cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 59, 46 % mengatakan tingkat komunikasi kurang tinggi dengan implementasi program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 61, 11 % mengatakan tingkat komunikasi rendah dengan implementasi program kurang tinggi.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara tingkat komunikasi (X1) dengan implementasi program (Y).

B. 1. 2. Hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program (X₂) dengan implementasi program PEMP (Y)

Hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program dengan implementasi program PEMP dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 7 sebagai berikut :

Tabel IV. 7
 TABULASI SILANG ANTARA KEMAMPUAN KERJA
 PELAKSANA PROGRAM (X2) DENGAN IMPLEMENTASI
 PROGRAM (Y)

Implementasi program	Kemampuan kerja pelaksana program				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	1			2
	(20%)	(3,7%)			(2,4%)
CT	3	14	7		24
	(60%)	(51,58%)	(15,91%)		(29,27%)
KT	1	12	27		40
	(20%)	(44,44%)	(61,36%)		(48,78%)
R			10	6	16
			(22,73%)	(100%)	(19,51%)
Jumlah	5	27	44	6	82
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV. 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa kemampuan kerja pelaksana program tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 60 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program cukup tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 51, 58 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar

61, 36 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program kurang tinggi dengan implementasi program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 100 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program rendah dengan implementasi program rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program (X₂) dengan implementasi program (Y).

B. 1. 3. Hubungan antara sikap kerja pelaksana program (X₂) dengan variabel implementasi program PEMP (Y)

Hubungan antara sikap kerja pelaksana program dengan implementasi program PEMP dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 8 sebagai berikut :

Tabel IV. 8
TABULASI SILANG ANTARA SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM (X₃) DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)

Implementasi program	Sikap kerja pelaksana program				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	2				2
	(18,18%)				(2,4%)
CT	8	13	3		24
	(72,72%)	(50%)	(7,89%)		(29,27%)
KT	1	12	26	1	40
	(9,09%)	(46,15%)	(68,42%)	(14,26%)	(48,78%)
R		1	9	6	16
		(3,85%)	(23,68%)	(85,71%)	(19,51%)
Jumlah	11	26	38	7	82
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV. 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa sikap kerja pelaksana program tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 72, 72 %

mengatakan sikap kerja pelaksana program tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program cukup tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 50 % mengatakan sikap kerja pelaksana program cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 68, 42 % mengatakan sikap kerja pelaksana program kurang tinggi dengan implementasi program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 85, 71 % mengatakan sikap kerja pelaksana program rendah dengan implementasi program rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara sikap kerja pelaksana program (X3) dengan implementasi program (Y).

B. 2. Analisis Kualitatif

Berikut ini analisis kualitatif yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal kondisi ini dilihat dari tingkat pemahaman penerima mprogram masih kurang. Dilihat dari proses implementasi program PEMP belum melibatkan calon penerima, jasa pelayanan kredit belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola program/ pelaksana program ditingkat manajemen program. Dilihat dari sisi manfaat, program yang didapat hanya sekedar menambah modal usaha masyarakat nelayan dan dampaknya relatif kurang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP kondisi ini bisa dilihat dari kurangnya pemahaman penerima program terhadap program PEMP, yang disebabkan oleh kurang jelasnya, rincinya dan memadainya serta media yang digunakan kurang efektif dalam memperjelas pesan-pesan kebijakan. Frekuensi penyampaian komunikasi program dari

pengelola program kepelaksana kurang, kemudian para pelaksana program pun pemahamannya terhadap program kurang karena rata-rata pendidikannya masih relatif masih rendah dan mereka jarang melakukan transfer komunikasi kepada penerima program. Kondisi yang terjadi di atas menyebabkan implementasi kebijakan kurang bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP kondisi ini terjadi karena sebagian besar para pelaksana program di lapangan yang merupakan koodinator kelompok sebagian besar sehingga mereka kurang memiliki kemampuan memadai menyangkut kemampuan teknis, kemampuan berinteraksi, kemampuan konseptual dan kemampuan berinteraksi rendah. Kondisi yang terjadi tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap proses implementasi yang terjadi dilapangan.

Sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP dilapangan, kondisi ini ditunjukkan oleh kurang baiknya komponen kognisinya seperti dalam menjalankan tugasnya meras kurang sesuai dengan keinginan pribadinya, kurang mempunyai penilaian yang positif terhadap program dan kurang yakin program akan memabawa perubahan positif bagi masyarakatnya. Kemudian Secara afektif apara pelaksana program PEMP merasa program bertentangan dengan keyakinan pribadinya dan norma yang dianutnya. Komponen konatif dari pelaksana program pun masih kurang terlihat dari kurang intensifnya dalam menarik angsuran, kurang melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk program dan kurang berinisiatif dalam memabangun kerjasama dengan penerima program. Sementara itu, berkaitan dengan tanggapannya terhadap program PEMP para pelaksana program kurang bisa menerima program dengan sepenuh hatinya, terkesan kurang netral dalam menjalankan tugasnya dan menganggap program hibah sehingga ada kesan aresisten terhadap program PEMP Kondisi inilah yang menjadikan proses implementasi program kurang berjalan secara maksimal dan berhasil secara maksimal pula.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen dan juga pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara tunggal maupun bersama-sama. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan teknik Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinan (KD).

Berikut ini tabel yang menunjukkan diterimanya hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian:

Tabel IV. 9
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

No	Korelasi variabel	Hasil pengujian	Status	Koefisien Determinan (KD)	Besarnya KD	Urutan
1	X1- Y	Z-test 8, 35 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X1-Y	39, 43 %	2
2	X2-Y	Z-test 7, 99 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X2-Y	36, 12 %	3
3	X3-Y	Z-test 8, 64 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X3-Y	42, 25 %	1
4	X1, X2 dan X3-Y	X^2 192, 626 > 118, 22 (sig 1%) dan 107, 52 (sig 5 %)	Diterima	X1, X2 dan X3-Y	61, 31 %	

D. Diskusi

Berikut ini berapa poin-poin penting hasil penelitian sebagai bahan diskusi terhadap hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi variabel implementasi kebijakan masih kurang berhasil.
2. Hasil rekapitulasi variabel tingkat komunikasi masih kurang mendukung.
3. Hasil rekapitulasi variabel kemampuan kerja pelaksana program kurang baik.
4. Hasil rekapitulasi variabel sikap kerja pelaksana program masih kurang baik.
5. Beberapa hipotesis yang diajukan diterima, berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang dapat dilihat pada tabel IV. 64 dibawah ini:

Tabel IV. 10
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

No	Korelasi variabel	Hasil pengujian	Status	Koefisien Determinan (KD)	Besarnya KD	Urutan
1	X1- Y	Z-test 8, 35 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X1-Y	39, 43 %	2
2	X2-Y	Z-test 7, 99 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X2-Y	36, 12 %	3
3	X3-Y	Z-test 8, 64 > Z-tabel 2, 64 (sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X3-Y	42, 25 %	1
4	X1, X2 dan X3-Y	X^2 192, 626 > 118, 22 (sig 1%) dan 107, 52 (sig 5 %)	Diterima	X1, X2 dan X3-Y	61, 31 %	

Dari tabel IV. 64, dapat dijelaskan bahwa:

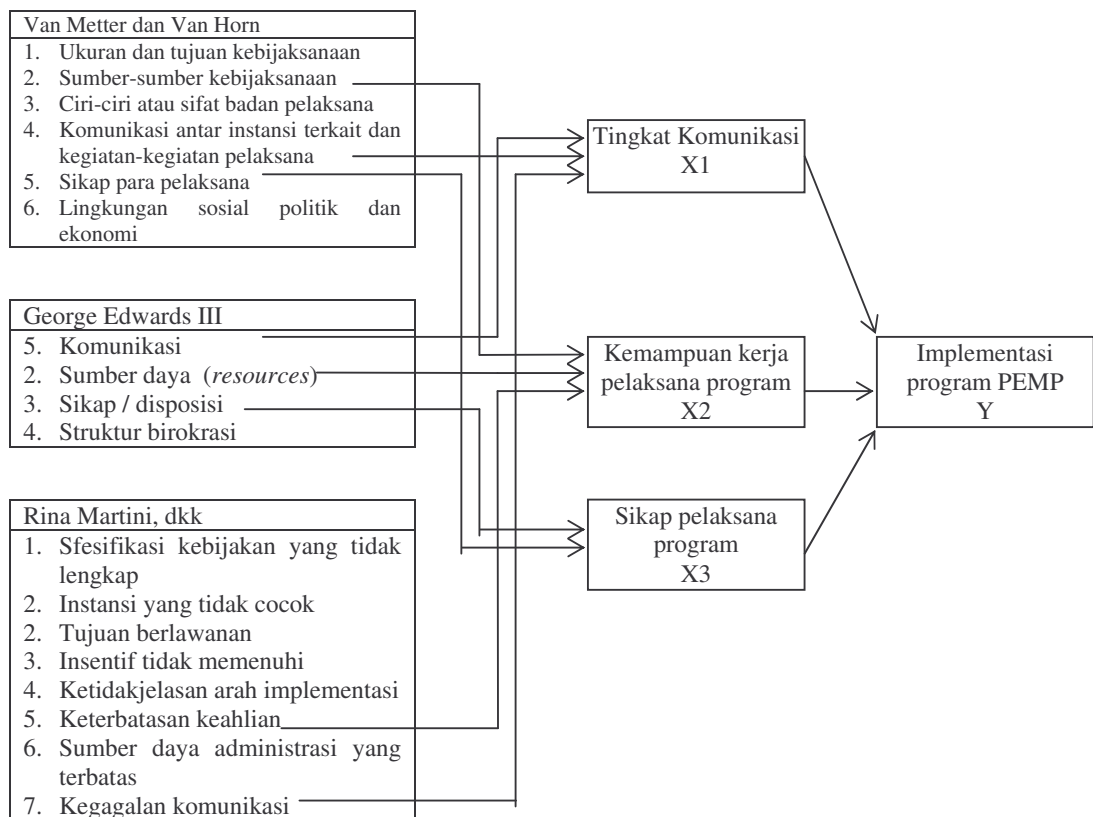
Variabel independen (X) yang dianggap mempunyai korelasi yang positif dan signifikan paling kuat dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap dependen variabel (Y) adalah sikap kerja pelaksana program (X2) dengan besarnya korelasi 8,64 dan besarnya pengaruh sebesar 42,25 %.

Kemudian hasil pengujian hipotesis mayor menunjukkan bahwa harga X kuadrat 192,626 > X tabel 118,22 (sig 1 %) dan 107,52 (sig 5 %) dengan besarnya pengaruh 61,31 %. Sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat diperoleh pula harga Non KD, yaitu sebesar $100\% - 61,31\% = 38,69\%$. Hal ini menunjukkan sebesar 38,69 % variasi yang terjadi pada implementasi program PEMP disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program(X3).

Penjelasan selanjutnya adalah bahwa hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan teori-teori yang diambil dalam penelitian adalah relevan, dimana gambaran dari relevannya hasil penelitian dengan landasan teori yang diambil adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini peneliti mengambil landasan teori yang mendasari penelitian yang difokuskan dalam studi implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas dengan menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, George Edwards III dan Rina Martini, dkk dengan bangun teori penelitian sebagai berikut:

Bagan IV. 1
 TEORI PENELITIAN
 PENGARUH TINGKAT KOMUNIKASI (X1), KEMAMPUAN KERJA
 PELAKSANA PROGRAM (X2), DAN SIKAP KERJA PELAKSANA
 PROGRAM (X3) TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)



Dengan mengacu pada bangun teori tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian tersebut secara teoritis dibahas oleh para ahli kebijakan publik dan selanjutnya berdasarkan teori-teori implementasi kebijakan publik tersebut peneliti melakukan sintesa teori dengan mengambil variabel-variabel penelitian untuk dependen variabel (Y) implementasi program, sedangkan untuk independen variabel (X) yaitu X1 tingkat komunikasi, X2 kemampuan kerja pelaksana program dan X3 sikap kerja aparat pelaksana program. Pengambilan variabel-variabel tersebut didasarkan pada gambaran obyektif yang dikemukakan dilatar belakang masalah bahwa kurang berhasilnya

implementasi program PEMP diduga disebabkan oleh faktor tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program.

Kondisi yang terjadi adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima, dimana variabel independen (X) yang paling kuat mempunyai hubungan dan pengaruh dalam variabel dependen (Y) implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas adalah sikap kerja pelaksana program (urut 1) dan lainnya mengikuti tingkat komunikasi (urut 2), dan kemampuan kerja pelaksana program (urut 3).

Kemudian secara bersama-sama juga terlihat bahwa variabel independen (Y) mempunyai hubungan kuat X-kuadrat sebesar 192, 626 dan pengaruh yang besar, dimana $KD = 61, 31 \%$ dalam variabel dependen (Y) yaitu implementasi program.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan implikasi yang muncul bilamana ketiga variabel tersebut tidak diperbaiki kemungkinan besar akan mengakibatkan kondisi implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas akan semakin kurang berhasil. Oleh karena itu maka perbaikan terhadap ketiga variabel tersebut, sesegera mungkin untuk diperbaiki dalam usaha menimbulkan implementasi program yang lebih berhasil.

Namun demikian dengan mengacu pada hubungan dan pengaruh tiap variabel independen dalam variabel dependen (Y) maka dimungkinkan untuk perbaikan implementasi program untuk diprioritaskan pada variabel tertentu berdasarkan nilai urutnya. *Pertama*, perbaikan pada sikap kerja pelaksana program. *Kedua*, perbaikan pada tingkat komunikasi. Dan *ketiga*, perbaikan pada kemampuan kerja pelaksana program.

6. Analisis kualitatif dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal, tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP, kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP, dan sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung

implementasi program PEMP dilapangan. Kondisi- kondisi ini menunjukkan analisis kualitatif hasil penelitian mendukung analisis kuantitatifnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian masih menunjukkan kondisi-kondisi yang kurang baik baik variabel dependen yaitu implementasi program (Y), maupun variabel independenya yaitu tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), maupun sikap pelaksana program.
2. Hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut diketahui bahwa variabel sikap kerja pelaksana program (X3) menunjukkan hubungan yang paling positif dan signifikan dengan implementasi program (Y) dan pengaruh yang paling besar terhadap implementasi program yang selanjutnya diikuti tingkat komunikasi (X1) dan kemampuan kerja pelaksana program (X2). Oleh karena itu, prioritas variabel yang menjadi prioritas dalam rangka perbaikan implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas adalah *pertama*, perbaikan pada sikap kerja pelaksana program . *Kedua*, perbaikan pada tingkat komunikasi. Dan *ketiga*, perbaikan pada kemampuan kerja pelaksana program.
4. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal, tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP, kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP, dan sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP dilapangan. Kondisi- kondisi ini menunjukkan analisis kualitatif hasil penelitian mendukung analisis kuantitatifnya.

B. Rekomendasi

1. Mengingat Non KD = $100\% - 61,31\% = 38,69\%$ maka sebanyak 38,69% bisa mengambil variabel lain diluar dari variabel pengaruh yang diambil dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kepada peneliti lain yang akan melakukan studi implementasi kebijakan untuk mengambil variabel-variabel penelitian diluar variabel tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap pelaksana program.
2. Memperbaiki sikap para pelaksana program PEMP dengan melakukan sarasehan atau rembug warga mengenai arti pentingnya sikap kerja dalam mendukung program PEMP. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan *learning by doing* yaitu proses pembelajaran bagi para pelaksana program dengan menghadirkan tokoh masyarakat yang dianggap berhasil dalam hidupnya dan mempunyai kemampuan dalam menyakinkan pelaksana program mengerti arti pentingnya program pembangunan. Harapan yang dapat dicapai dengan adanya kegiatan tersebut para pelaksana program akan berpandangan positif terhadap program pembangunan sehingga akan berperilaku mendukung implementasi program PEMP.
3. Melakukan komunikasi program yang lebih intensif kepada penerima program dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan diadakannya program, manfaat program, dampak yang dapat dicapai dengan adanya program PEMP, bagaimana implementasi program PEMP dilapangan dengan melakukan:
 - Pendekatan secara interpersonal yang dilakukan pengelola program selaku pihak yang memajemen program baik mengatur keuangan, menentukan strategi bagaimana mengimplementasikan kebijakan dilapangan dan bertanggungjawab terhadap program PEMP kepada pelaksana program dilapangan sehingga mereka merasa *diuwongke* dan dianggap menjadi pihak yang mempunyai jasa bagi suksesnya implementasi program PEMP.
 - Para pengelola program PEMP secara intensif berinisiatif datang ketiap kelompok penerima program dengan memperbanyak intensitas pertemuan

dengan pelaksana program yang merupakan koordinator kelompok dan para penerima program yang merupakan anggota dari kelompok.

- Media komunikasi yang digunakan dalam transfer informasi program PEMP untuk ditingkatkan, media tersebut berupa surat resmi, spanduk, famplet dan, papan informasi tentang materi program dan tata cara implementasi program. Dengan adanya media komunikasi yang semakin beragam tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas pesan komunikasi yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lancarnya proses implementasi dan semakin efektifnya implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas.
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen program bagi para pelaksana program. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja pelaksana program PEMP yang diarahkan pada meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan teknis, kemampuan berinteraksi, kemampuan konseptual dan kemampuan administratifnya sehingga mereka mampu menjadi pelaksana program lapangan yang memberikan kontribusi yang positif bagi implementasi program PEMP itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pelatihan kemampuan pelaksana program PEMP
- a. Membuat master plan mengenai pelatihan kemampuan kerja bagi pelaksana program, meliputi:
 1. Menentukan waktu, hari dan tempat pelatihan
 2. Menentukan materi-materi pokok yang diajarkan dalam pelatihan
 3. Menentukan metode-metode yang tepat dan efektif yang digunakan dalam pelatihan bagi pelaksana program PEMP.
 4. Menentukan pihak-pihak yang dianggap kapabel untuk menjadi tenaga pelatihan bagi pelaksana program PEMP
 5. Membuat estimasi anggaran untuk biaya pelatihan
 - b. Implementasi pelatihan manajemen program PEMP
 - a. Melakukan sosialisasi pelatihan manajemen program kepada para pelaksana program melalui pertemuan yang dihadiri pengelola

manajemen program dan calon peserta pelatihan yaitu para pelaksana proyek

- b. Pelaksanaan pelatihan berupa pelatihan bagi para pelaksana program PEMP. Dalam pelaksanaan ini dilakukan pengenalan teori-teori tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana program PEMP, melakukan diskusi tentang materi yang diajarkan dengan metode Forum Discussion Group (FGD) dan melakukan simulasi tentang bagaimana melaksanakan implementasi program PEMP di lapangan.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan pelaksana program PEMP, pelatihan yang telah dilakukan kemudian dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan apakah hasil pelatihan tersebut secara maksimal telah mampu mendukung implementasi program PEMP di lapangan.
5. Alokasi dana program PEMP untuk tahun-tahun selanjutnya di Kelurahan Tanjung Mas dan wilayah-wilayah lain di Pantai Utara Pulau Jawa bagi masyarakat nelayan untuk ditingkatkan sehingga akan menimbulkan tambahan modal usaha bagi masyarakat nelayan yang cukup signifikan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Kemudian dalam rangka untuk memotivasi dan menimbulkan komitmen terhadap tugas kerja para pelaksana program baik pengelola program (manajemen program) maupun para koordinator program untuk diberi insentif yang layak dan ini tentunya diharapkan penambahan alokasi dana program PEMP dialokasikan untuk insentif tugas kerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin, 1997, *Kebijaksanaan: Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 1988, *Sikap Manusia, Teori dan Pemikirannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas diponegoro, Semarang.
- Bryant, Coraly dan White, G. Louise, 1988, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Denhard, Robert, 1994, *Public Administration, Action and Orientation*, Wordworth Publicing Company, Belmont.
- Dwianto, Agus, 1999, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, makalah disampaikan pada pelatihan TMKR, MAP-UGM, Yogyakarta, 1999.
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall. inc, New York.
- Efendi, Sofyan dan Singarimbun, Masri, 1998, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Gibbson, L, James dkk, 1998, *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Islami, M. Irfan, 1992, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Imawan, Riswanda, 1999, *Kebijakan Publik*, Magister Administrasi Publik, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Jiwanto, Gunawan, 1985, *Komunikasi dalam Organisasi*, Pusat Pengembangan Manajemen, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Moenir, A. S, 1987, *Pendekatan Manusia dalam Organisasi terhadap Penataan Pegawai*, Gunung Agung, Jakarta.
- Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Computindo, Gramedia, Jakarta.
- Purnaweni, Hartuti, 1994, *Diklat Kebijakan Publik, suntingan dari dari Implementing Publik Policy oleh George Edwards III*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Steers, M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, di Terjemahkan oleh Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sabatier, A. Paul and Mazmanian Daniel, 1986, *Effective Policy Implementation*, Health, Lexington Mass DC.
- Siagian, P. Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, (ed), 1982, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- , 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soemidjo, Wahyu, 1987, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Subana, M. dan S. Sudrajat, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan V, Alfabet, Bandung.
- Taufik, Ahmad, 1987, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Semarang.
- Thoha, Miftah, 1990, *Aspek–Aspek Pokok Ilmu–Ilmu Administrasi*, Ghalia, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 1996, *Teori Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPress, Yogyakarta.
- Wirawan Sarwono, Sarlito, 1998, *Psikologi Sosial : Individu dan Teori–teori Psikologi Sosial*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuwono, S, 1989, *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Liberty, Jakarta.
- Buku Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMP), 2003, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.